

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, pasal 49 ayat (1): “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan daerah (APBD)”. Sebuah apresiasi yang sangat besar terhadap pendidikan dengan alokasi yang tidak sedikit, sekalipun faktanya anggaran yang dialokasikan pemerintah belum sesuai dengan amanat undang-undang.

Standar pembiayaan sebagai salah satu standar nasional pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Uraian standar pembiayaan pendidikan dapat ditelusuri dari peraturan pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (PP RI SNP) “Pada Bab IX pasal 62 dari PP tersebut disebutkan bahwa standar pembiayaan pendidikan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia terdiri atas biaya investasi, biaya oprasi dan biaya personal”. Biaya investasi satuan pendidkan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Adapun biaya operasi pendidikan

tidak langsung berupa daya, air, transportasi, komunikasi, konsumsi, uang lembur pemeliharaan sarana prasarana, pajak, asuransi, dan lain sebagainya, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan pendidikan yang dapat menunjang segala aktivitas pendidikan baik formal maupun informal. Pembiayaan menjadi komponen pendidikan yang mempunyai peran sangat penting atas berjalannya proses pembelajaran. Keuangan dan pembiayaan merupakan salahsatu sumberdaya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya baik disadari maupun tidak disadari (Wagiran 2006: 1).

Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan terutama di madrasah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah diatur, direncanakan dan dipergunakan dengan baik dan tepat sasaran pada kebutuhan yang di perlukan, dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. “pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan direncanakan dikelola serta di organisir secara baik dan tepat sesaran akan menunjang terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan sekolah/madrasah” (E.Mulyasa 2004: 47). Pengelolaan pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya sistem manajemen yang baik,

dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus berkaitan erat dengan suatu manajemen pendidikan.

Manajemen sebagai suatu disiplin keilmuan yang secara singkat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan madrasah. Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran. Maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut sebagai manajemen pembiayaan/keuangan.

Terkait dengan pembiayaan pendidikan, banyak permasalahan muncul yang ditimbulkan dari penyalahgunaan realisasi anggaran yakni, minimnya anggaran pendidikan, penyimpangan dalam penyaluran dana pendidikan, banyaknya lembaga pendidikan yang kekurangan dana menjadi permasalahan bangsa yang tidak kunjung usai serta alokasi pendanaan yang belum memadai. Seperti halnya dikutip dari Darmaningrats “alasan kritis yang menyebabkan alokasi dana pendidikan dialihkan untuk distribusi BBM juga menjadi persoalan tersendiri” (Darmaningtyas 2011: 249). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikatakan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sekolah dalam praktiknya masih banyak kenjanggalan dan belum memenuhi harapan.

Dari hasil studi pendahuluan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur pada tanggal 3-4 November 2017 peneliti menemukan realita masalah pembiayaan di lapangan, salah satunya yaitu minimnya pembiayaan pendidikan di

madrasah, hal ini sangat menghambat proses pembelajaran. Maka pihak sekolah membuat alternatif dan inspirasi yaitu dengan bentuk bekerja sama bersama wali siswa, masyarakat dan *steakholder* lainnya untuk berkerjasama dalam memajukan pendidikan. Dari hasil studi pendahuluan tersebut maka menurut peneliti masalah ini menarik untuk diteliti bagaimana pihak madrasah mengelola pembiayaan yang minim untuk kemajuan pendidikan.

Penelitian ini berfokus pada kasus manajemen pembiayaan yang ada di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah, yang berlokasi di Desa Sindangkerta Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur. Tidak berbeda dengan madrasah-madrasah lain, Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur sebagai sekolah swasta yang berada dalam naungan Kementerian Agama, juga turut serta dalam menjalankan fungsi pendidikan bagi warga negara. Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur sebagai madrasah swasta menghadapi tantangan luar biasa seiring dengan tantangan zaman. “Minimnya dana pendidikan yang di peroleh di madrasah, hingga kurang terealisasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan pembangunan madrasah seringkali menjadi terhambat, maka dari itu disini perlu adanya transparansi dan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, agar masyarakat tahu dan mengerti bagaimana cara sekolah mengelola pembiayaan secara sehat” (Hasil Studi Wawancara). Kondisi demikian dikarenakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat/orang tua siswa masih lemah untuk membiayai pendidikan, sehingga kurang berminat untuk menyekolahkan

putra-putrinya. Disisi lain mengingat akses masyarakat kelas menengah ke atas menyekolahkan putra-putrinya di sekolah umum negeri favorit.

Dari fenomena diatas terdapat beberapa masalah mendasar diantaranya: bagaimana madrasah melakukan manajemen pembiayaan? Bagaimana proses pembiayaan pendidikan dengan dana yang minim? Program apa saja yang menjadi penunjang kesuksesan pembiayaan di madrasah? Dan apa saja yang menjadi penghambat dalam pembiayaan di madrasah?

Berdasarkan hasil fenomena di atas penting kiranya untuk diteliti dan dikembangkan, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian kualitatif dengan judul **“Manajemen Pembiayaan Madrasah (Penelitian di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar alamiah Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur?
2. Apa Saja Sumber Pembiayaan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur?
3. Bagaimana Proses *Budgeting* pembiayaan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur?
4. Bagaimana Proses *Accounting* pembiayaan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur?

5. Bagaimana Proses *Auditing* pembiayaan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur?
7. Bagaimana hasil yang dicapai dari pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar alamah Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur.
- b. Untuk mengetahui apa saja sumber pembiayaan yang digunakan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur.
- c. Untuk mengetahui proses *Budgeting* pembiayaan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur.
- d. Untuk mengetahui proses *Accounting* pembiayaan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur.
- e. Untuk mengetahui proses *Auditing* pembiayaan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur.
- f. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur.
- g. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai permasalahan dalam bidang manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah/sekolah.

2. Secara praktis

Penelitian dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan manajemen pembiayaan di lembaga-lembaga pendidikan secara umum maupun secara khusus.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan lebih dahulu dibahas mengenai latar alamiah, karena penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (Moleong 2011: 8). Hal tersebut dalam kerangka pemikiran penelitian ini akan dijadikan sebagai latar alamiah lahirnya objek kajian peneliti.

Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011: 8) bahwa penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.

Menurut mereka hal tersebut didasarkan atas beberapa asumsi:

1. Tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat, karena itu hubungan penelitian harus mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks untuk keperluan pemahaman;
2. Konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penemuan mempunyai arti bagi konteks yang lainnya, yang berarti bahwa suatu fenomena harus diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan; dan
3. Sebagian struktur nilai kontekstual bersifat determinatif terhadap apa yang dicari.

Penelitian Kualitatif lebih fokus untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk kepentingan generalisasi dan menurut Sumanto yang dihasilkan dari penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah (Yaya Suryana, 2009: 92).

Ide biasanya muncul karena ada masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia, maka ide inilah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ide itu kemudian dituangkan dalam tulisan, perbuatan, tindakan atau lainnya yang kemudian menjadi teori dan kumpulan dari teori-teori itu disebut konsep. Masalah-masalah yang menyebabkan timbulnya ide dalam penelitian dinamakan latar alamiah. Hal ini tersebut kemudian akan di elaborasi dalam kerangka pemikiran penelitian ini menjadi latar alamiah munculnya konsep metodologi penelitian pembiayaan pendidikan. Uraian tersebut diatas membawa peneliti untuk

memasuki dan melibatkan sebagian waktunya apakah di sekolah, keluarga, tetangga, dan lokasi lainnya untuk meneliti masalah pendidikan atau sosiologi (Moleong 2011: 8).

Dengan kata lain bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan sebagai cara untuk memahami agama. antropologi dalam kaitan ini sebagaimana dikatakan Dawam Rahardjo, lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan yang sifatnya partisipatif (Abuddin Nata, 2001: 59).

Oleh karena itu, pada waktu mengumpulkan data dilapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Penulis menamakan cara pengumpulan data demikian *pengamatan-berperan serta* atau *participant observasion* (Moleong 2011: 9).

Manajemen merupakan suatu cabang ilmu yang usianya relatif masih muda. Istilah lama yang sering digunakan adalah administrasi. Manajemen berasal dari kata "*to manage* yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola" (John M Echol, 1992: 372).

Menurut Stoner dan Freeman dalam sonedi (2017: 29), manajemen adalah suatu proses perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas.

Manajemen mempunyai fungsi kegiatan, menurut G.R.Terry dalam Badrudin (2013: 14) fungsi manajemen terdiri dari 4 yaitu: *Planning* yang artinya

Perencanaan, *Organizing* yang artinya Pengorganisasian, *Actuating* yang artinya Penggerakan/Pelaksanaan, dan *Conrolling* yang artinya Pengawasan.

Biaya dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan biaya pendidikan menurut Nanang Fatah (2012: 112) dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan.

Biaya dalam pendidikan terdiri dari: ” biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*)” (Nanang Fatah, 2012: 23). Biaya langsung dalam pendidikan berupa biaya yang dipergunakan untuk keperluan habis pakai (biaya operasional), bisa langsung dirasakan oleh peserta didik yang bersangkutan, sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya yang tidak tampak (tenaga, pikiran, kesempatan/waktu), dipergunakan untuk menempuh pendidikan secara tidak langsung.

Jaja Jahari (2013:75) “menjelaskan bahwa manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian. Ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (*Budgeting*), tahap pelaksanaan (*Accounting*), tahap penilaian atau evaluasi (*Auditing*)”.

Budget atau anggaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan. “Dalam pendidikan *budget* diartikan sebagai RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)” (PP No.19.Tahun 2005). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di sekolah.

Penganggaran di sekolah terdapat dua bagian yaitu anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan. Proses penyusunan anggaran di sekolah sangat sederhana dan kepala sekolah dapat melaporkan secara sederhana. Format yang digunakan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) meliputi: “1) sumber pendapatan antara lain DPP, OPF dan BP3, 2) pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran, serta honorarium dan kesejahteraan” (E. Mulyasa, 2004: 174).

Adapun sumber pendapatan lain yaitu dari “Wakaf, zakat, sodaqoh, hibah dan lain sebagainya” (Jaja Jahari, 2013:84). Penganggaran yang bersifat rencana dan dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memajukan lembaga pendidikan, karena setiap lembaga pendidikan sangat memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya, maka anggaran harus disusun dan digunakan dengan baik dan terarah. “Strategi penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau madrasah pada dunia pendidikan saat ini sangat terpengaruh oleh berbagai perubahan, yaitu dalam segi aspek politik, sosial budaya, teknologi, industri, maupun informasi” (Nanang Fattah, 2012: 54).

Accounting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi karena ilmu manajemen adalah ilmu yang berasal dari dunia

ekonomi maka bahasa tersebut sudah tidak asing lagi digunakan sebagai bagian dari ilmu manajemen keuangan.

“Pembukuan merupakan kegiatan pengurusan keuangan” (Nanang Fattah, 2012: 138). Pengurusan itu meliputi dua hal yakni: Pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, pengurusan ini disebut dengan kepengurusan ketatausahaan. Pengurusan tindak lanjut dari kepengurusan pertama yakni, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut penentuan kewenangan, tetapi melaksanakan pengelolaan keuangan yakni penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan uang, yang dikenal dengan istilah kebendaharawan (Masruroh, 2013:23).

Menurut Nanang Fattah (2012: 318) bendaharawan adalah orang atau badan yang diberikan tugas untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang dan surat berharga. Dengan jabatan bendaharawan itu, maka seseorang mempunyai wewenang dan kewajiban mempertanggungjawabkan urusannya terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa pembukuan merupakan kegiatan mengorganisir pembiayaan. “Seorang bendahara melaksanakan pembukuan serta mengontrol keuangan, mulai dari uang masuk sampai dengan uang keluar, sehingga transparansi keuangan semakin jelas dan terorganisasi” (Masruroh, 2013: 24).

“*Auditing* merupakan semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak- pihak yang berwenang” (Nanang Fattah, 2012: 138). Unit yang ada dalam departemen/organisasi, mempertanggung jawabkan urusan keuangan adalah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui departemen masing-masing. Menurut Nanang Fattah (2012: 138). Dalam pelaksanaan *auditing*, data pembukuan menjadi pokok pemeriksaan, dengan cara menentukan informasi yang tercatat dengan data yang ada dilapangan untuk diverifikasi kebenarannya.

Kata madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (*zharaf makan*) dari akar kata *darasa*. Secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar/peserta didik, atau tempat untuk memberikan pelajaran. Dari akar kata *darasa* juga bisa diturunkan kata *madras* yang mempunyai arti buku tempat belajar, kata "*madrasah*" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti sekolah” (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam pada jalur pendidikan formal yang setara dengan sekolah, jenjang pendidikan di madrasah terdiri dari: Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Keagamaan. Perbedaan sekolah dengan madrasah terdapat pada sistem pengajaran, pendidikan di madrasah lebih menekankan pada pendidikan agama, sedangkan pendidikan di sekolah lebih menekankan pada ilmu pengetahuan umum.

Ahli sejarah pendidikan A.L.Tibawi dan Mehdi Nakosteen, mengatakan bahwa: “Madrasah dalam bahasa Arab merujuk pada lembaga pendidikan tinggi yang luas di dunia Islam (klasik) pra modern” (Ahmad Zayadi, 2005: 19). Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai muatan lebih terhadap mata pelajaran agama khususnya agama Islam, dan mempunyai kesetaraan dengan sekolah umum baik jenjang dasar dan menengah, sehingga madrasah juga mempunyai hak dalam memperoleh biaya pendidikan baik dari pemerintah (pusat, daerah), orang tua peserta didik maupun masyarakat.

Menurut Syakdiah, (2005: 9) penyelenggara kegiatan pendidikan di sekolah /madrasah harus membuat perencanaan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah/Madrasah (RAPBS/M). Dengan tujuan untuk pedoman pengumpulan dana, juga sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang-uang yang diterima. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah dikategorikan menjadi lima yakni anggaran rutin dan APBN (anggaran pembangunan), dana penunjang pendidikan, bantuan/sumbangan dari BP3, sumbangan dari pemerintah daerah setempat dan bantuan lain-lain.

Dalam operasionalnya, pendidikan dimadrasah tidak akan terlepas dari adanya faktor penunjang dan faktor penghambat yang dapat bersumber dari faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor penunjang adalah segala hal yang membantu dan mendukung terhadap pelaksanaan pendidikan dan dalam mencapai tujuan, sedangkan faktor penghambat adalah segala hal yang dapat mempengaruhi,

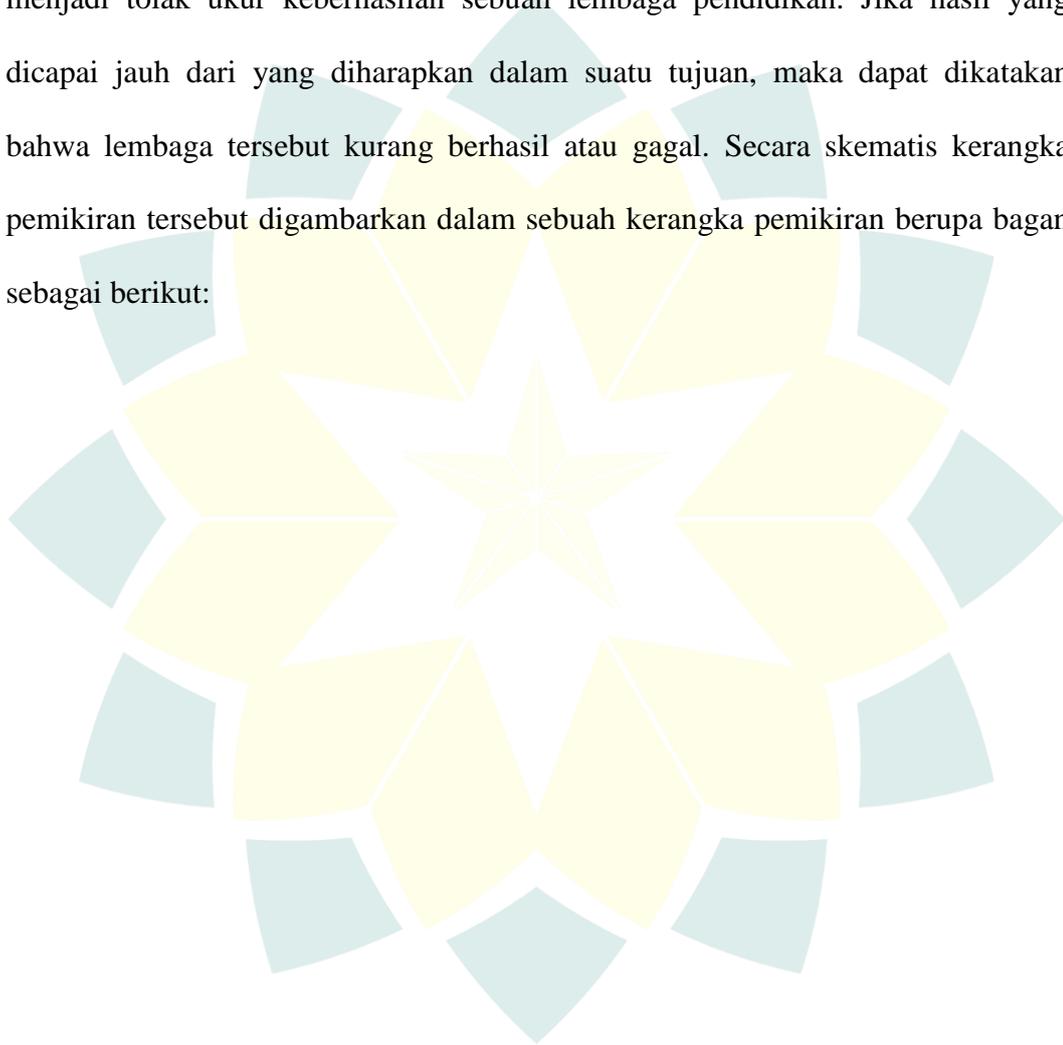
memperlambat terhadap pelaksanaan pendidikan dan dalam meraih tujuan. Seperti masalah administrasi, pembiayaan, sarana pendidikan atau lingkungan masyarakat disekitar lembaga pendidikan. Sedikit banyak faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi pada tingkat keberhasilan dan laju perkembangan lembaga pendidikan tersebut.

Faktor pembiayaan turut memberikan pengaruh yang besar bagi kelancaran dan keberhasilan pendidikan. Karena tanpa adanya biaya pendidikan maka aktivitas belajar mengajar atau kegiatan yang lain di madrasah serta kebutuhan fisik atau nonfisik tidak akan terlaksana. Sebab jantung sekolah adalah keuangan sekolah demi memenuhi kebutuhan sekolah/madrasah.

Pengkajian terhadap faktor penunjang dan penghambat tersebut merupakan usaha untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari sebuah sistem dalam pembiayaan pendidikan. Sehingga dengan ditemukannya faktor-faktor itu dapat meningkatkan sebuah proses pembelajaran yang *efektif* dan *efisien* dalam mengelola lembaga pendidikan yang ada, semua ini akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan laju perkembangan sebuah lembaga pendidikan Islam.

Keberhasilan bagi seluruh lembaga pendidikan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh semua pihak dan lembaga tersebut dapat menjadi lembaga yang berkualitas, yang nantinya akan dijadikan sebuah model oleh lembaga-lembaga pendidikan sejenis. Salah satu standar kualitas lembaga pendidikan adalah kualitas *output*-nya. Dan keberhasilan yang dicapai oleh lembaga pendidikan harus sesuai dengan tujuan yang diharapkannya sebab inilah yang

menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Jika hasil yang dicapai jauh dari yang diharapkan dalam suatu tujuan, maka dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut kurang berhasil atau gagal. Secara skematis kerangka pemikiran tersebut digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran berupa bagan sebagai berikut:

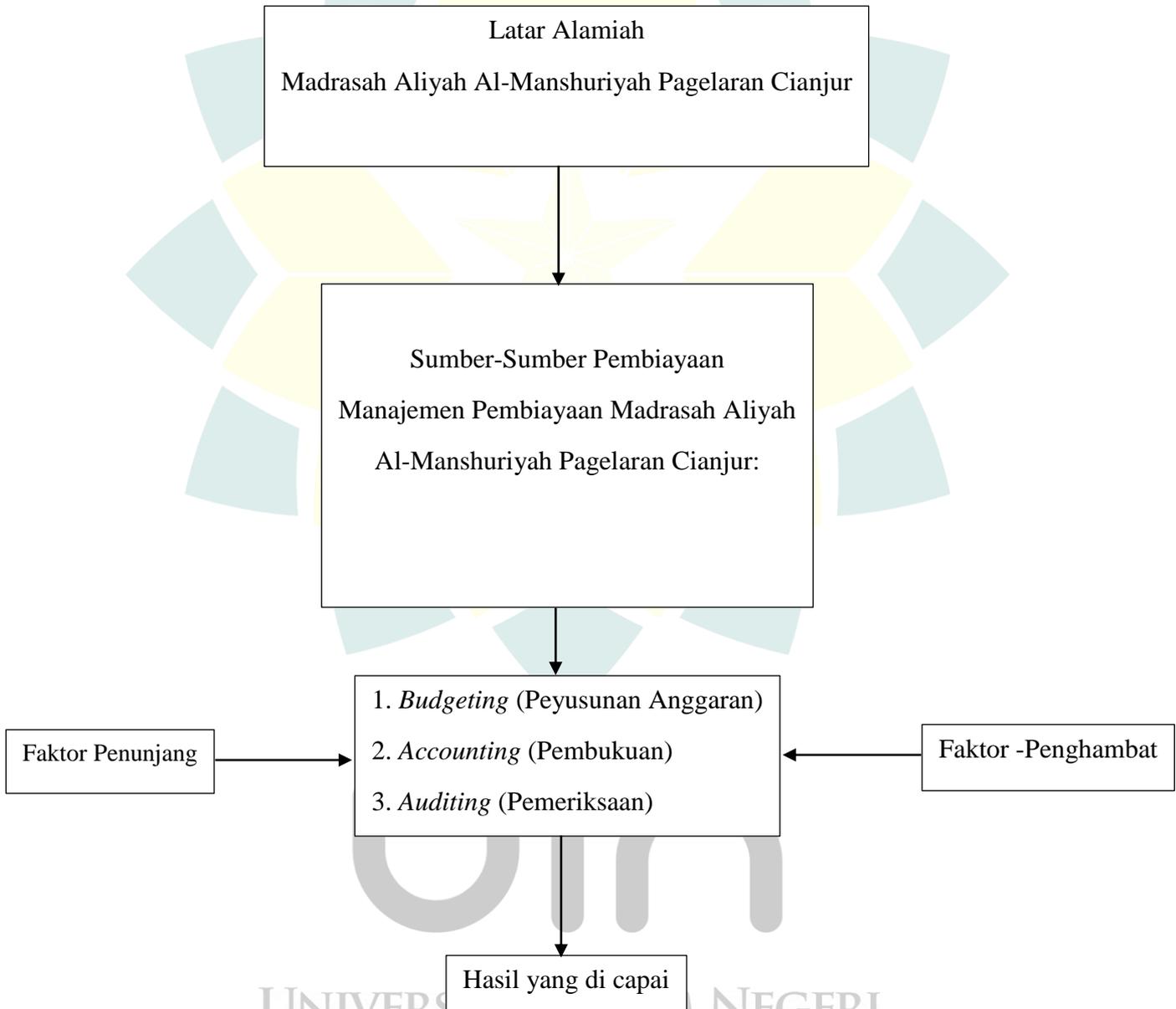


uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Manajemen Pembiayaan Madrasah

(Penelitian di Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Pagelaran Cianjur)



Bagan.1.1

F. Kajian Pustaka dan Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk lebih memperdalam kajian mengenai manajemen pembiayaan madrasah, telah dikaji beberapa pustaka yang relevan dengan penelitian ini dan beberapa pustaka tersebut telah menginspirasi peneliti, untuk melakukan penelitian ini. Dari beberapa pustaka yang dikaji antara lain:

1. Buku karya Jaja Jahari “*Manajemen Madrasah*”. Dalam buku yang dicetak penerbit Alfabeta Tahun 2013 ini dijelaskan mengenai bagaimana Manajemen Pembiayaan Madrasah dilakukan secara *efektif* dan *efisien*, berikut menjelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran selain dari anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sumber-sumber tersebut terdiri dari Zakat, Sodaqoh, Donatur, Wakaf milik masyarakat yang diberikan kepada pengelola yayasan untuk dimanfaatkan bagi pendidikan, serta diatur dan dimanage sesuai keilmuan yang ada untuk ketercapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. karena hal yang paling mendasar dalam proses pendidikan adalah pembiayaan.
2. Buku “Konsep Manajemen Berbasis Sekolah” (MBS) dan Dewan Sekolah, Karya Prof. Dr. H. Nanang Fattah, didalam buku ini berisikan tentang bagaimana sekolah mengelola segala sumberdaya menyangkut kelembagaan baik internal maupun eksternal. Selain itu didalam buku ini dimuat mengenai konsep dasar manajemen berbasis sekolah dengan salah satu sub bahasannya yaitu manajemen keuangan dan penggalian sumber dana.
3. Skripsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Kabupaten Bandung yang disusun oleh Yudi Imansyah jurusan Manajemen

Pendidikan Islam fakultas tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan telah ditetapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi analisis perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan komunikasi. Yang membedakan penelitian dengan skripsi ini adalah cara pengelolaan pembiayaan dan objek penelitian.

4. Jurnal Pendidikan Islam yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Analisis School Levy) Vol.17 No. 2 Tahun 2012 yang ditulis oleh Umi Zulfa Institut Agama Islam Imam Gozali (IAIIG) Kesugihan Cilacap Jawa Tengah. Dalam artikel jurnal ini paparkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan dalam prospektif Islam yang mengusung Konsep School Levy Berbasis Potensi Umat. Penelitian ini memaparkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan tidak harus mengandalkan anggaran pajak dari pemerintah, karena pendidikan adalah kewajiban bersama sebagai umat Islam, maka diperlukannya transparansi oleh lembaga pendidikan terhadap masyarakat luas agar memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan bangsa dengan cara bersedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Letak perbedaan penelitian sbelumnya dengan penelitian ini ialah terletak pada sumber pembiayaan sedangkan penelitian ini tidak hanya terfokus pada sumber-sumbernya saja tapi terfokus pada keseluruhan aspek manajemen pembiayaan pendidikan.